

EFEKTIVITAS KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Safa Muzdalifah^{1*}, Sandra Bhakti Mafriana², Andi Tenri Somp³, Muhammad Kamil Attijani⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

⁴ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Korespondensi: safa.muzdalifah@ulm.ac.id

ABSTRACT

Coordination between governments is an important thing to do in flood disaster management. In 2021, South Kalimantan was affected by the largest flood disaster since the last 50 years. This study aims to determine the effectiveness of intergovernmental coordination, namely by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Kalimantan Province in handling floods. The research method used is a qualitative with a descriptive type. The data sources used are primary data, namely from BPBD elements, and secondary data in the form of documents. The data collection techniques used are Interview and literature studies. The results showed that BPBD coordination in flood management in South Kalimantan tends to be quite effective. This is inferred from the coordination grooves formed both horizontally and vertically. The main challenge in coordination is the egocentricity of government agencies in responding to flood disasters.

Keywords: *Coordination; Government; Disaster; Mitigation*

ABSTRAK

Koordinasi antar pemerintah merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir. Pada Tahun 2021 Kalimantan Selatan terdampak bencana banjir terbesar sejak 50 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas koordinasi antar pemerintah yakni oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni dari unsur BPBD, dan data sekunder yakni berupa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan cenderung cukup efektif. Hal ini disimpulkan dari alur koordinasi yang terbentuk baik secara horizontal maupun vertikal. Tantangan utama dalam koordinasi yaitu egosentris instansi pemerintah dalam menyikapi bencana banjir.

Kata Kunci: Koordinasi; Pemerintah; Penanggulangan; Bencana

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara

pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk

oleh pegunungan meratus di tengah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan lainnya yaitu terdiri dari banyak rawa dan sungai. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk daerah rawan bencana banjir. (Kumalawati et.al:2019)

Pada awal tahun 2021, bencana banjir terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi adalah salah satu sebabnya. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, berkisar antara 2000-3000 mm / tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Terdapat 67 sungai di Kalimantan Selatan yang kondisinya kurang baik dan tidak

dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir BPS Kalsel, 2022). Bencana banjir ini adalah yang terparah yang pernah dialami oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Berikut ini tabel rincian rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan:

Tabel: I Rincian Jumlah Rumah dan Korban Terdampak Banjir Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	Terdampak		
		Rumah	Mengungsi	Meninggal
1	Tapin	582	382 Jiwa	1 Orang
2	Banjar	6.670	11.269 Jiwa	3 Orang
3	Banjar Baru	2.156	3.690 jiwa	1 Orang
4	Tanah Laut	8.506	13.062 jiwa	7 orang
5	Balangan	1.154	17.501 Jiwa	-
6	Tabalong	407	770 Jiwa	-
7	Hulu Sungai Tengah	16.000	8.000 jiwa	3 Orang
8	Hulu Sungai Selatan	387	6.690 jiwa	-
9	Banjarmasin	1.152	3.701 Jiwa	-
10	Barito Kuala	517	28.400 Jiwa	-

Sumber: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Tahun 2021

Kajian koordinasi lembaga merupakan isu penting dalam tataran

penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem yang ada. Dalam praktiknya, koordinasi merupakan tantangan utama di antara individu, kelompok, dan organisasi dalam rangka merespon bencana (Bahadori, Khankeh, Ziboli dan Malmir, 2015: 274).

Beberapa penelitian yang fokus pada penanggulangan bencana alam mengatakan bahwa koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015; 34-39) sebaliknya, lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana.

Joined-Up Government merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan aspek koordinasi yang kuat di antara lembaga pemerintah dalam mengelola isu publik tertentu (Roestoto, 2012; 45). Menurut Pollit (2003; 34), *Joined-Up Government* adalah “a phrase which denotes the aspiration to achieve

horizontally and vertically coordination thinking and action”. Dari uraian Pollit tersebut dijelaskan bahwa koordinasi horizontal dan vertikal adalah elemen utama dari *Joined-Up Government*. Menurut Handyaningrat (Sentika, 2015: 20-22) koordinasi antar pemerintah terdiri dari koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional, yaitu kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat. Pelaksanaan koordinasi horizontal menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Fungsi komando yakni fungsi sebagai pimpinan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi komando dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Fungsi koordinasi yakni Kerjasama dengan mitra Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Koordinasi vertikal adalah antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, di mana yang koordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan

yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*line of command*).

Joined-Up Government melalui proses koordinasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai hambatan di birokrasi sehingga ada penyebaran informasi di antara lembaga pemerintah. Salah satu sektor publik yang membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat antar institusi pemerintah yaitu sektor penanggulangan bencana.

Penanggulanagn bencana di Indonesia, ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni dilaksanakan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen, dan berfungsi sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana di daerah dengan tugas pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Pemerintah berkewajiban melaksanakan tindakan penanggulangan bencana seperti tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yakni

“Pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pasal 4 poin G, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan bencana adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih mendalam pada Pasal 23 Ayat 2, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi yaitu: a). Koordinasi; b). Komando; dan c). Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dengan ini diharapkan terselenggaranya penanggulangan bencana dengan baik, karena pemerintah sebagai pelaksana menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Berikut adalah gambar I.

Gambar: I Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Pada daerah rawan bencana, mengukur efektivitas koordinasi penanggulangan bencana merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Menurut George Robert Terry, efektifitas koordinasi dapat diukur melalui indikator informasi, komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi, pencapaian kesepakatan bersama dan komitmen. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator untuk mengukur koordinasi. Menurut Ndraha (2003; 23) hal tersebut meliputi: 1) Informasi, komunikasi dan teknologi informasi; 2) Pemahaman pentingnya berkoordinasi; 3) Partisipan yang memiliki kompetensi diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat; 4) Pencapaian kesepakatan Bersama dan komitmen setiap anggota organisasi; 5) Pentingnya kesepakatan setiap pihak dalam organisasi; 6) Insentif koordinasi diberikan bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakatan Bersama; dan 7) Adanya *feedback* yang dapat digunakan untuk koordinasi selanjutnya.

Penelitian terkait efektivitas koordinasi penanganan kebencanaan minim dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan

penelitian oleh Murnil dan Alhadi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar Stakeholders dilakukan dengan efektif (Nesy Yulia Murni dan Zikri Alhadi, 2019). Kajian koordinasi penanganan kebencanaan khususnya banjir tidak pada pengukuran efektivitas koordinasi yang dilakukan. Selain itu, literatur efektivitas koordinasi kebencanaan khususnya dalam penanganan banjir di Kalimantan Selatan belum ada. Meninjau hal tersebut maka kajian efektivitas lembaga pemerintah terkait kebencanaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dan dapat menjadi sumbangsih dalam bentuk evaluasi kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada rangkaian penjelasan, dapat dicermati bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tulisan penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana koordinasi itu dilakukan, dan efektivitas koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Akbar (2009:78) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah dengan memahami makna interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Selanjutnya menurut Bungin (2015: 124) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi proposisi makna di balik realitas yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Bungin (2015:78) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dibagi dalam tiga fase, yakni fase sebelum atau pencegahan (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), fase pada saat atau tanggap darurat (Bidang Kedaruratan dan Logistik), dan fase sesudah atau pemulihan (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Pada tahap pencegahan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut merupakan koordinasi BPBD Provinsi dengan 2 (dua) instansi yang membawahi langsung terkait penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pula instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aspek geologi yakni potensi Gerakan tanah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika. (BMKG) terkait potensi cuaca. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra SKPD Provinsi, antara lain dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerukan sungai, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pelaksana teknis dilakukan oleh dinas terkait, namun

dikoordinasikan oleh BPBD untuk penanggulangan bencana.

Koordinasi BPBD selanjutnya adalah pada saat tanggap darurat, yakni respon cepat atas bencana yang terjadi. Koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang berkaitan dalam upaya tanggap darurat bencana banjir, meliputi instansi yang berada di bawah pemerintah pusat bukan instansi daerah otonom, yakni BNPB, Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui Polisi Daerah (POLDA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelejen Stratgei (BAIS), dan Pertamina untuk keamanan suplai energi selama tanggap darurat bencana. Selain itu, pada fase tanggap darurat koordinasi juga dilakukan dengan SKPD seperti Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten/Kota.

Koordinasi BPBD dalam tahap pemulihan atau pascabencana dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanggulangan bencana secara keseluruhan dilakukan sejak tanggap darurat hingga pasca terjadinya bencana, yakni pada tahap status siaga darurat, tanggap darurat, status transisi, hingga status pemulihan. Khusus untuk

penanggulangan pascabencana dilakukan di fase status transisi, yakni fase status darurat ke pemulihan. Pada tahap ini, langkah awal yang dilakukan adalah kajian kebutuhan pasca bencana atau disebut jitupasna, yakni menghitung kerusakan, menghitung kerugian, dan menghitung kebutuhan pascabencana. Sektor-sektor yang dikaji pada tahap ini antara lain sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan ekonomi. Setelah menyusun jitupasna, langkah selanjutnya adalah membuat Rancangan Pemulihan Dini (RPD), dan Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana (RRPP).

Koordinasi pada tahap pascabencana dilakukan dengan BNPB khususnya dalam kegiatan penyerahan data yang telah dihimpun dan dibuat dalam bentuk RPD, kemudian direkomendasikan oleh gubernur, dan akhirnya diverifikasi oleh BNPB. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan BPBD kabupaten/kota, SKPD Provinsi ataupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2021, maka dapat diidentifikasi berbagai bentuk koordinasi

dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi horizontal, yakni BPBD Provinsi dengan SKPD Kabupaten atau Kota. BPBD juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD Kabupaten/Kota yang merupakan jalur satu komando dengan lembaga tertinggi adalah BNPB dan Kemendagri. Selain itu, BPBD Provinsi juga melakukan koordinasi secara diagonal yakni dengan lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti POLDA, TNI, BIN, BAIS, serta Lembaga-Lembaga Kementerian, di mana koordinasi ini dilakukan dengan instansi pemerintah di luar satu jalur komando.

Efektivitas Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Pelaksanaan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana ditindaklanjuti dengan mengkaji efektivitas koordinasi yang dilakukan. Efektivitas koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari beberapa unsur meliputi penggunaan media informasi, komunikasi, dan teknologi, tingkat pemahaman urgensi koordinasi, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan, pencapaian kesepakatan dan komitmen bersama, dan ada tidaknya *feedback* untuk koordinasi selanjutnya.

Aspek Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi. Koordinasi BPBD pada saat penanggulangan bencana banjir pada Tahun 2021 menggunakan metode komunikasi yang sebelumnya tidak lazim digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi saat itu yang bersamaan dengan kemunculan Pandemi Covid-19. Pandemi mendorong pegawai instansi pemerintah membatasi diri secara sosial, sehingga memunculkan pola adaptasi baru dalam hal berinteraksi. Komunikasi BPBD dalam tahap prabencana pada Tahun 2020 dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara *hybrid*, yakni secara *online* dan *offline* terbatas. Teknologi informasi yang digunakan berupa *zoom meeting*, *google meet*, dan *whatsapp video call*.

Pada saat koordinasi, hal yang dilakukan adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pada saat pandemi Covid-19 melandai, koordinasi dapat dilakukan secara *offline* dengan mengumpulkan BPBD Kabupaten/Kota, BAPPEDA, dan instansi terkait untuk melakukan penilaian ketahanan daerah, mengukur hasil kerja, dan koordinasi dengan dinas Lembaga terkait.

Pada saat koordinasi tanggap darurat, komunikasi berjalan sebagaimana

mestinya dengan pihak-pihak terkait berdasarkan SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana. SK Gubernur ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat Bersama instansi-instansi yang tergabung dalam struktur komando untuk membahas tanggap darurat. Komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan media Pusdalop (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana), dan *whatsapp*. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mendapat mandat telah mengetahui tugas pokok dan fungsi sehingga dapat berjalan.

Pada tahap pemulihan bencana komunikasi berjalan dengan baik. Informasi yang digali adalah terkait keadaan 5 sektor utama dalam pemulihan, antara lain pemukiman, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial, dan aktifitas jual beli masyarakat.

Efektivitas koordinasi pada tahap prabencana berdasarkan penjelasan yang diberikan tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya BPBD untuk menggunakan media alternatif dalam berkoordinasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, meskipun dapat dicermati bahwa pada saat offline perolehan data menjadi lebih utuh untuk diterima oleh BPBD. Selain itu, efektivitas koordinasi

dapat dinilai Ketika eskalasi banjir kedepannya jarang terjadi.

Aspek Kesadaran Urgensi Koordinasi. Pada tahap prabencana, kesadaran instansi-instansi terkait dalam koordinasi bencana kurang. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut bukan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana atau tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, namun memiliki kompetensi yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Seiring berjalannya waktu Lembaga-lembaga tersebut mulai memiliki kesadaran, khususnya Ketika banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahap tanggap darurat, kesadaran akan pentingnya melakukan koordinasi penanggulangan bencana sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk rapat pembagian tugas, dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan kewajibannya.

Pada tahap pemulihan, koordinasi dengan SKPD Kabupaten atau kota direspon dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemulihan diberbagai sektor, antara pemukiman, ekonomi, sosial, hingga infrastruktur. Pemulihan tersebut

hanya dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

Aspek Kompetensi Partisipan dalam Pengambilan Keputusan. Pada tahap prabencana, kemampuan partisipan mengambil keputusan dalam hal ini BPBD Provinsi bersama lembaga-lembaga terkait sudah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan pentingnya koordinasi dalam penanggulangan bencana, dan menghasilkan keputusan-keputusan pencegahan bencana banjir di kemudian hari. Tidak dipungkiri, bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan diawal tahun 2021 merupakan dampak dari perencanaan penanggulangan yang tidak optimal.

Pada tahap tanggap darurat, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan tanggap darurat sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat dengan instansi-instansi terkait yang menghasilkan keputusan pembagian tugas yang jelas selama tanggap darurat dan dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Pada saat pascabencana atau pemulihan, telah disusun keputusan pemulihan pascabencana yang mencakup sektor-sektor penting untuk masyarakat, namun hal yang menjadi kendala adalah persoalan dana. Sehingga diperlukan

penyesuaian anggaran akan tetapi ada prioritas yang didahulukan untuk dikerjakan.

Aspek Pencapaian Kesepakatan dan Keputusan Bersama. Pada tahap prabencana, pencapaian kesepakatan dan keputusan Bersama pada saat koordinasi berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perselisihan keputusan yang terjadi antar berbagi partisipan, dan hasil keputusan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada tahap tanggap darurat, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan fungsi penanggulangan sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Pada saat pascabencana, aspek mengutamakan pemulihan kondisi masyarakat menjadi prioritas, sehingga upaya untuk solid dalam melaksanakan keputusan adalah hal yang diutamakan.

Aspek Feedback untuk Koordinasi Selanjutnya. *Feedback* merupakan aspek yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi. *Feddback* dalam koordinasi dapat berupa saran, kritik, atau informasi terkait kinerja yang dilakukan. Dalam koordinasi penanggulangan bencana, *feedback* diperoleh melalui forum evaluasi yang disebut RAKERIS (Rapat Kerja Teknis). Pada rapat ini dilakukan

evaluasi capaian kegiatan-kegiatan yang Kestelah dilakukan.

Pada forum RAKERIS, setelah evaluasi dilakukan, dilanjutkan dengan membahas agenda prabencana, yakni penyusunan rencana penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki musim kemarau, yakni persiapan Rakor Siaga Karhutla, sebelum memasuki musim penghujan dilakukan Rakor Siaga Batingor (banjir, dan tanah longsor).

Pada tahap pascabencana, *feedback* dilakukan dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan pascabencana. Evaluasi dilakukan dengan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana untuk pemulihan. Hal-hal yang dimonitoring meliputi pembangunan fisik, jumlah masyarakat yang telah menikmati hasil pemulihan atau rekonstruksi rumah rusak berat, rusak ringan, atau rusak sedang.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari terpenuhinya beberapa aspek efektivitas koordinasi. Koordinasi tergolong cukup efektif karena komunikasi

yang dilakukan secara baik dengan menggunakan teknologi komunikasi mengingat bersamaan dengan pandemi covid-19, kompetensi partisipan dalam menghasilkan keputusan dimiliki dengan baik, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, dalam koordinasi pencapaian kesepakatan bersama dilakukan dengan mudah karena tidak ditemukannya perselisihan antar partisipan, terdapat *feedback* atau timbal balik selama proses penanggulangan bencana. Namun, terdapat kelemahan dalam membangun efektivitas koordinasi yakni kurangnya kesadaran Lembaga-lembaga dalam koordinasi yang dipengaruhi oleh faktor egosentris Lembaga. Lembaga-lembaga yang tidak berkewenangan langsung dalam penanggulangan bencana, perlu diberi penjelasan lebih terkait pentingnya kontribusinya dalam penanggulangan bencana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung pendanaan untuk dilakukannya penelitian ini, yang tertuang dalam SK Penugasan Nomor 023.28/UN8.2/PL/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas. (2007). *Pedoman Praktis Penanggulangan Bencana Banjir-Bakornas PB* (Vol. 344, Issue 021).
- Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 11, No. 2. ISSN:2614-5863
- Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 1(1), 263–275.
- Nesy Yulia Murnil dan Zikri Alhadi, (2019), Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Jurnal Pembangunan Nagari, Vol.2 No. 2019, h. 61-70
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurfatiehah, Site (2019). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sentika. TB Rachmat. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Setiyanto.W.A.N. (2017). *Joined-Up Government (Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3).

PROFIL SINGKAT

Safa Muzdalifah lahir di Bojonegoro 27 November 1989, lulusan S1 Sarjana Strata Satu) Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (2008-2012), dan Magister Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (2012-2015). Pada Tahun 2015 berkarir sebagai Dosen di Universitas Darul 'Ulum Jombang dan pada Tahun 2019-sekarang sebagai Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada karir mengajar dan penelitian saat ini menekuni bidang ilmu pemerintahan dengan fokus pada globalisasi dan tata kelola pemerintahan, ekologi pemerintahan, inovasi pemerintahan, dan pelayanan pemerintah di sektor publik.



ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%